

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, pembentukan pemerintah Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah didalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Instansi-instansi sebagai pelaksana yang dibentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahannya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam organisasi sektor publik, kinerja dapat diukur melalui elemen aparatur pemerintah, khususnya di pemerintah daerah sendiri dinamakan aparatur pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki tanggungjawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, (Nurbaeti dan Nugraha, 2019). Kinerja Pegawai yang baik dapat diukur berdasarkan hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Kinerja pegawai yang baik membuat kinerja suatu organisasi pemerintah menjadi semakin baik.

Akuntansi adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi (*American Accounting Association-AAA*).

Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya.

Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan. Kepemerintahan yang baik ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Ketiga pilar dimaksud adalah : Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas.

Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah menurut (Binawati Enitaand Nurul Badriyah (2022) yaitu: kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Kinerja bagian dari produktivitas kerja, produktivitas berasal dari kata produktif yang artinya sesuatu yang mengandung potensi untuk digali, sehingga produktivitas dapatlah dikatakan sesuatu proses kegiatan yang terstruktur guna menggali potensi yang ada dalam sebuah komoditi. Penerapan akuntansi yang baik

oleh instansi pemerintah serta pengawasan yang optimal dari pihak internal maupun pihak eksternal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah dapat optimal. Melalui pengawasan intern, dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintahan sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan kepada masyarakat melalui DPR/D setiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan Kepala Pemerintah. Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara telah memasuki suatu era transparansi dan akuntabilitas.

Hal tersebut ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah

pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kinerja pemerintah menunjukkan deskripsi dari tingkat pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik karena kinerja menggambarkan hasil kerja yang dicapai pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya atas dasar kecakapan, pengalaman, serta keterampilan.

Fungsi pengawasan menjadi masalah penting bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya program kerja pemerintah secara akuntabel. Meningkatnya kegiatan pengelolaan keuangan daerah dengan nilai anggaran yang lebih besar dan terperinci ke berbagai program kerja membuat fungsi pengawasan menjadi semakin penting untuk mencegah kecurangan dan penyimpangan serta mengarahkan penggunaan anggaran yang lebih optimal pada program kerja yang bermutu. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta telah

menggunakan anggaran publik secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukuroleh karena itu kinerja menjadi salah satu faktor penting dalam instansi pemerintahan, Selain itu kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Adapun beberapa faktor yang mampu membantu meningkatkan kinerja pegawai, yang pertama adalah sarana pendukung sistem informasi akuntansi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ainisha, Agnes Aura,2022)membuktikan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jika efektivitas sistem informasi akuntansi semakin tinggi, maka kinerja karyawan juga semakin tinggi. Akan tetapi dalam Putri, R. W., & Astuti, P (2022), dikatakan bahwa untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan suatu organisasi tidak hanya mengacu pada sistem informasi akuntansi yang digunakan,tetapi perlu adanya sistem pengendalian internal yang dapat mengatur perilaku para karyawan di dalam perusahaan sehingga para karyawan tidak akan bertindak yang dapat merugikan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul **“Pengaruh Penerapan Akuntansi**

Pemerintah,Kinerja Pegawai, dan Pengawasan Internal Terhadap Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen”

Fenomena dari penelitian ini adalah Kabupaten Bireuen mengalami upaya kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat atau memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai rencana anggaran. Lalu, peningkatan kinerja pegawai sering kali menjadi fokus utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Pemerintah daerah juga sering berupaya untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi juga sangat diperlukan untuk memudahkan pelaporan dan pemantauan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Bireuen ?
2. Bagaimana pengaruh Kinerja Pegawai terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Bireuen ?
3. Bagaimana pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kabupaten Bireuen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kinerja Pegawai terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kabupaten Bireuen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Pemerintah,Kinerja Pegawai, dan Pengawasan Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bireuen.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optional.

3. Bagi Pembaca dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi sebagai bahan pembandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.